

## **Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana Hibah Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ummu Syahidah Gorontalo**

**Yulianti Abdullah**

*Yuliantiabdullah521@gmail.com*  
Universitas Negeri Gorontalo

**Nilawaty Yusuf**

*nilawaty.yusuf@ung.ac.id*  
Universitas Negeri Gorontalo

**Ronald S. Badu**

*ronaldsoemitro@ung.ac.id*  
Universitas Negeri Gorontalo

### *Abstrak*

*This study aimed to assess the extent to which accountability accounting is applied in the management of grant funds at the Ummu Syahidah Social Welfare Institution. The research method employed was descriptive qualitative. Data collection was carried out using observation, interviews, and documentation studies techniques. The Result of the study revealed that the implementation of responsibility accounting in the management of grant funds at the Ummu Syahidah Social Welfare Institution adhered to the requirements for responsibility accounting and the interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK 35), particularly in terms of organizational structure, planning/budgeting, implementation/control which were found to be properly implemented. However, the institution has yet to carry out cost classification/account code preparation and presentation of financial reports. Therefore, it is recommended that the institutions optimize the fulfilment of grant management requirements to establish trust among all parties*

*Keywords: Accountability Accounting, ISAK 35, Grant Management*

### **A. PENDAHULUAN**

Tata kelola keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah telah mengalami banyak perubahan. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah semakin meningkat. Transparansi atau keterbukaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena akuntabilitas dan pengelolaan keuangan pemerintah daerahlah yang harus mendukung sistem akuntansi pemerintah yang dapat memberikan informasi untuk pengawasan dan pertanggungjawaban (Stewardship and Accountability). (Purba et al., 2021)

Pengelolaan Keuangan yang baik, tentunya membutuhkan sebuah landasan atau acuan yang jelas agar pengelolaan keuangannya detail dan teratur salah satunya dengan cara menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang diatur sedemikian rupa sehingga akan dilakukan pengumpulan, pencatatan dan penerimaan uang sebagai pusat pekerjaan dalam

perusahaan, dengan maksud agar seseorang atau kelompok dapat mempertanggung jawabkannya. perbedaan anggaran dan pendapatan (Mulyadi et.al., 2009). Pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi lembaga maupun instansi pemerintah. Karena dengan adanya pengelolaan keuangan tentu kita dapat melihat aktivitas untuk memperoleh sumber pendanaan dan biaya yang dikelola oleh suatu instansi atau lembaga baik yang mengutamakan profit/keuntungan atau lembaga nirlaba yang memiliki tujuan tertentu salah satunya untuk mengawasi Tingkat kecurangan. pengelolaan dana hibah masih terdapat penyelewengan dan penyalahgunaan dana hibah demi kepuasan diri pribadi contohnya dalam kasus korupsi yang dilakukan “IPH”, dan tudingan korupsi tahun 2019 muncul ketika Pemprov Gorontalo memberikan bantuan kepada KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Gorontalo sebesar 1,5 Milyar, “IPH” selaku ketua KONI memerintahkan bendahara “YH” akan menjawab pertanyaan berdasarkan bukti dari pengeluaran yang tidak sesuai.

Dari contoh kasus diatas, peneliti merasa tertarik untuk melihat sejauh mana LKS Ummu Syahidah melakukan pertanggungjawaban atas semua hibah yang telah diberikan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sumber anggaran LKS Ummu Syahidah umumnya didapati dari dana hibah yang diberi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sejumlah Rp.300.000.000 pertahunnya. dana sebesar tersebut tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaannya, dengan demikian maka sistem akuntansi pertanggung jawaban memiliki peran penting bagi lembaga dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang digunakan. Dengan demikian penulis menggunakan ISAK 35 yaitu Aturan Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba untuk mengetahui sejauh mana LKS memanfaatkan Dana Hibah tersebut.

Pada penelitian terdahulu oleh Ferizna (2021) membahas tentang penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban atas penyaluran dana pada yayasan dana sosial Al-Falah Surabaya sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana hibah di LKS Ummu Syahidah. hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah bentuk pertanggungjawaban suatu laporan dalam penggunaan laporan keuangan untuk memberikan keterbukaan dan transparansi atas informasi keuangan dan bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dalam suatu lembaga. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban atas penyaluran dana pada yayasan dana sosial AlFalah Surabaya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan ilmu akuntansi yang berhubungan dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana hibah di LKS Ummu Syahidah Provinsi Gorontalo. Serta dapat menjadi kontribusi dan referensi bagi penelitian mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengelolan dana hibah di Provinsi Gorontalo.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Uraian deskriptif menjadi unsur utama dalam penelitian ini karena peneliti ingin menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan yang akan di amati dilapangan dengan lebih spesifik, transparan/terbuka, dan mendalam agar data yang di dapat bisa di pahami dengan mudah oleh pembaca. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara tidak terstruktur dan teknik observasi. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata atau tindakan” selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Terkait dengan masalah penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Studi dokumentasi dan Observasi

Analisis data diperoleh dari hasil observasi, hasil wawancara dan studi dokumentasi dan kemudian menganalisis yang dilakukan dengan cara membandingkan antara teori-teori yang telah ada dengan data-data yang didapat dari studi kasus. Dalam analisis data penelitian menurut Milles dan Huberman (Harahap:2021). Pengumpulan data di melakukan analisis data secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi berupa data laporan keuangan dan realiasi pengelolaan dana hibah di LKS Ummu Syahidah sesuai dengan informasi data yang didapati di lapangan. Penyajian data juga dilakukan dengan Mereduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting saja. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang terdiri dari menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi datanya. Disamping reduksi data juga dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori/variabel.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indikator yang dijadikan sebagai pedoman wawancara di ambil dari syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan indikator yang terdapat dalam ISAK 35 (Interpretasi standar laporan keuangan) mengenai aturan penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba. Berikut hasil wawancara dengan ketua, sekretaris dan bendahara serta informan pendukung lainnya yang berada di LKS Ummu Syahidah.

### **1. Perencanaan/penganggaran**

Menurut akuntansi pertanggungjawaban, perencanaan anggaran harus mencakup anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional meliputi biaya operasional normal seperti gaji karyawan, pengadaan bahan baku dan biaya operasional lainnya. Pada saat yang sama, pengeluaran untuk tujuan investasi atau akuisisi aset tetap dimasukkan ke dalam anggaran modal. perencanaan anggaran atau penyusun anggaran harus memiliki pemahaman yang baik tentang keadaan dan kebutuhan organisasi agar dapat menyusun anggaran yang efektif dan efisien. Selain itu, perencanaan anggaran juga harus mampu memantau dan mengevaluasi pengeluaran organisasi secara berkala agar sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun.

Begitupun pada LKS Ummu Syahidah dalam perencanaan anggaran semua pihak berkepentingan dan mempunyai hak dalam pengambilan keputusan serta harus ikut serta dalam proses pembuatan perencanaan/penganggaran. LKS Ummu Syahidah memiliki proses perencanaan anggaran yang melibatkan ketua dan bendahara LKS. Rancangan anggaran biaya (RAB) disusun oleh bendahara dengan masukan dari ketua LKS mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses penganggaran dilakukan dengan menyesuaikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dengan harga yang sesuai dan cukup dengan anggaran yang tersedia. Dalam hal pertanggungjawaban, ketua dan bendahara bertanggungjawab secara bersama-sama atas pengelolaan anggaran LKS. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam akuntansi pertanggungjawaban, dimana setiap pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan. Dalam konteks peraturan ISAK 35, proses perencanaan anggaran tersebut seharusnya mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keputusan perencanaan anggaran harus didiskusikan bersama dengan semua pengurus dalam LKS, sehingga keputusan yang diambil dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan terkait dengan ISAK 35, perencanaan anggaran dalam LKS harus mengacu pada kebutuhan dan standar layanan. Dalam contoh yang diberikan, layanan rekreasional telah ditentukan kebutuhannya, seperti transportasi dan kebutuhan makanan, sehingga anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.

Perencanaan anggaran yang dilakukan dalam LKS tersebut mengalami kendala terutama terkait dengan keterbatasan anggaran yang hanya sebesar 300.000.000 per tahun. Karena anggaran yang terbatas, maka honor untuk para pengurus dibawah rata-rata bahkan ada yang hanya 1.000.000 honorinya. Hal ini menunjukkan bahwa LKS tersebut memiliki keterbatasan dalam melakukan pembayaran honor kepada pengurusnya serta. hal ini dapat menimbulkan masalah pengendalian anggaran karena gaji yang rendah tersebut dapat mengurangi motivasi para pengurus dalam menjalankan tugas mereka dan juga dapat berdampak pada kualitas layanan yang diberikan oleh LKS. Selain itu, terdapat pula kendala dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan operasional dan kebutuhan makanan anak di LKS tersebut

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, serta dilakukan penilaian ulang terhadap alokasi anggaran yang sesuai dengan tujuan organisasi dan mempertimbangkan segala risiko yang ada. Selain itu, penggunaan anggaran juga harus dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh para pengurus dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam hal ini, dapat diterapkan teori penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang dapat membantu dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien berdasarkan prioritas dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, dapat pula diterapkan teori partisipatif dalam perencanaan anggaran yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait pengalokasian anggaran di LKS tersebut. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan anggaran sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan LKS tersebut

LKS mengadakan kegiatan sosial enterpreneur UMKM sebagai salah satu upaya dalam membangun kreativitas anak-anak sekaligus menambah sedikit anggaran dalam bagian makanan. Solusi ini memiliki kaitan dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban, yaitu konsep yang mengharuskan setiap orang atau bagian yang bertanggung jawab atas suatu tindakan atau keputusan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menyelesaikan masalah yang timbul. Selain itu, solusi ini juga dapat dikaitkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang terdapat dalam ISAK 35, yaitu tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan.

## 2. Penggolongan Biaya/Penyusunan Kode Rekening

Mengklasifikasikan pengeluaran dan membuat kode akun merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi. Klasifikasi pengeluaran dan pembuatan kode akun yang sistematis dan terstruktur memfasilitasi pengelolaan dan pemantauan pengeluaran keuangan organisasi. Pengelompokan biaya dapat dilakukan berdasarkan jenis organisasi dan sumber pendapatan. Pada umumnya pengelompokan biaya meliputi biaya operasi, biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Selain itu, biaya juga dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan atau program kerja yang dilakukan organisasi. Meskipun pembuatan kode akun dapat dilakukan berdasarkan klasifikasi biaya yang dikeluarkan (Peraturan Kementerian Keuangan, 2019) Setiap pembayaran diberi kode akun yang berbeda, sehingga memudahkan untuk menyimpan, melacak, dan menjalankan laporan keuangan. Kode rekening biasanya terdiri dari beberapa angka atau gabungan angka dan huruf yang memiliki arti tertentu, seperti jenis pengeluaran, sumber pendanaan, dan program kerja.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penggunaan kode rekening dalam pembukuan keuangan tidak lagi dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau keahlian dalam penggunaan kode rekening, yang mengakibatkan kurang efektifnya sistem pembukuan keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan kode rekening agar penggunaannya dapat dilakukan dengan tepat dan efektif dalam pengelolaan keuangan, terdapat indikasi bahwa lembaga tersebut belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, khususnya terkait dengan penggolongan biaya dan penyusunan kode rekening.

## 3. Pelaksanaan / pengendalian

Pelaksanaan/pengendalian anggaran adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran organisasi dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dana organisasi secara efektif dan efisien serta meminimalkan risiko keuangan. Lembaga kerjasama sosial (LKS) melakukan pengendalian anggaran melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengurangi anggaran yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Hal ini dilakukan dengan cara meminjam fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh lembaga lain, sehingga pengeluaran anggaran dapat ditekan. Dalam hal ini, LKS melakukan strategi kolaborasi dengan stakeholder atau pihak lainnya dalam melaksanakan kegiatan, sehingga dapat mengurangi pengeluaran anggaran. Contohnya, dalam kegiatan rekreasi anak, LKS mengajak lembaga lain untuk

bergabung dan menyediakan tenda serta sound sistem, sehingga LKS tidak perlu lagi menyewa tenda dan sound sistem. Namun, LKS tetap memperhatikan aspek kualitas makanan sebagai bagian yang harus diatasi. Dalam konteks akuntansi, pengendalian anggaran merupakan bagian penting dari sistem pengendalian manajemen, yang bertujuan untuk mengontrol penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam hal ini, LKS menunjukkan upaya yang baik dalam melakukan pengendalian anggaran dengan meminimalkan pengeluaran melalui strategi kolaborasi dengan pihak lain sehingga dapat memaksimalkan penggunaan anggaran dan meminimalkan risiko pemborosan anggaran. terkait dengan pelaksanaan pengendalian anggaran yang ketat untuk memastikan bahwa anggaran tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Isu pemangkasan gaji karyawan sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan anggaran lain yang lebih mendesak juga menunjukkan bahwa organisasi ini serius dalam mengelola keuangan mereka. Karyawan organisasi tersebut juga sepakat untuk bekerja sama dan memberikan kontribusi dalam penghematan anggaran, misalnya dengan memaksimalkan penggunaan anggaran makanan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang terdapat dalam ISAK 35, di mana organisasi harus memastikan pengelolaan keuangan mereka transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta melakukan pengawasan dan pengendalian yang tepat untuk mencegah risiko keuangan.

Secara teori, pendekatan yang relevan adalah Teori Pengendalian Anggaran (Mulyadi,2014). Teori ini berfokus pada upaya organisasi untuk mengelola anggaran dengan melakukan pengendalian yang efektif terhadap pengeluaran. Dalam hal ini, LKS mengimplementasikan pengendalian anggaran dengan mencari harga yang murah dan mengurangi variasi makanan, sebagai bentuk pengendalian biaya yang dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan dana hibah. melakukan pengendalian yang efektif terhadap pengeluaran.

Sehingga LKS diharapkan dapat mengikuti prinsip-prinsip ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan klien titipan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu didasarkan pada informasi yang akurat dan terpercaya. Menerapkan sistem berbayar menjadi salah satu upaya dalam meminimalisir pengeluaran uang karena mengingat terdapat lebih banyak klien daripada anggaran, maka hal tersebut harus dilakukan demi kelangsungan klien yang ada di LKS Ummu Syahidah.

#### 4. Pelaporan Pertanggungjawaban Biaya Berdasarkan ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Non Laba

Menurut ISAK 35, laporan keuangan yang dihasilkan yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan kompherensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas. Setiap organisasi/ lembaga nirlaba pada dasarnya harus menggunakan standar pelaporan yang sesuai hukum dan undang – undang yang berlaku di indonesia. ISAK 35 memberikan panduan tentang penyajian laporan keuangan berbasis nonlaba, yang mana cocok untuk LKS Ummu Syahidah yang berorientasi pada tujuan sosial, bukan profit. Oleh karena itu, sistem pelaporan biaya dan pertanggungjawaban di LKS Ummu Syahidah harus didesain untuk mencatat dan melaporkan kegiatan organisasi secara jelas dan terperinci, serta memberikan informasi yang berguna bagi

para pemangku kepentingan. Akan tetapi, masih terdapat banyak kendala dalam melakukan pelaporan keuangan sesuai standar dimana hal tersebut disebabkan oleh bendahara memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Meskipun demikian, ditemukan bahwa informan memahami pentingnya pelaporan keuangan, namun kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan.

Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan laporan keuangan yang terlihat pada hasil wawancara tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ISAK 35, yaitu Prinsip Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Nonlaba. Salah satu prinsip yang terdapat dalam ISAK 35 adalah bahwa laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang jelas dan terperinci, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai dan relevan tentang keuangan organisasi. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pembuatan laporan keuangan yang lengkap dan akurat, sehingga informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Selain itu, ISAK 35 juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan, sehingga organisasi harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Berikut ini adalah laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh LKS Ummu Syahidah yang dimana sudah sesuai dengan standar menurut ISAK 35, yaitu sebagai berikut :

1) Laporan Penghasilan Kompherensif

<b>LKS UMMU SYAHIDAH</b>			
<b>LAPORAN PENGHASILAN KOMPERHENSIF</b>			
<b>DESEMBER 2022</b>			
<b>(Dalam Ribuan Rupiah)</b>			
<b>TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>			
Pendapatan			
Dana Hibah	Rp.	300,000,000	
Total Pendapatan		Rp.	<b>300,000,000</b>
Beban - Beban			
Beban Gaji	Rp.	258,000,000	
Beban	Rp.		

Pemeliharaan		500,000	
Beban Lain-Lain	Rp.	17,552,000	
Beban Honorarium Narasumber	Rp.	12,600,000	
Beban Transport	Rp.	500,000	
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp.	250,000	
Beban Perbaikan	Rp.	600,000	
Total Beban	Rp.		<b>290,002,000</b>
Surplus (Defisit)	Rp.		<b>9,998,000</b>
<b>DENGAN PEMBatasan DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>			
Pendapatan	Rp.	-	
Total Pendapatan	Rp.		<b>-</b>
Beban - Beban	Rp.	-	
Total Beban	Rp.		<b>-</b>
Surplus (Defisit)	Rp.		<b>-</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
	Rp.		<b>-</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>			
	Rp.		<b>9,998,000</b>

Tabel 1 Laporan Penghasilan Komprehensif  
Sumber: Penelitian Skripsi Tahun 2023

Dari laporan penghasilan komprehensif di atas, dapat dilihat bahwa pada bulan Desember 2022, LKS Ummu Syahidah memperoleh pendapatan sebesar Rp.300,000,000 dari dana hibah. Sementara itu, total seluruh beban yang dikeluarkan oleh LKS Ummu Syahidah adalah sebesar Rp.290,002,000, yang terdiri dari berbagai macam beban seperti beban gaji, pemeliharaan, honorarium narasumber, transport, beban perbaikan dan lain-lain.

Didalam penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 pendapatan yang dikurangi beban- beban apabila tersisa maka artinya lembaga tersebut mengalami surplus yang artinya jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja yang kemudian harus di ungkapkan dalam laporan penghasilan kompherensif. Setelah

mengurangi total beban dengan pendapatan, LKS Ummu Syahidah memperoleh surplus sebesar Rp.9,998,000 pada bulan Desember 2022. Surplus yang dimaksud bukanlah pendapatan yang akan dibagi hasil seperti organisasi profit pada umumnya, tetapi Surplus tersebut dapat diartikan bahwa LKS Ummu Syahidah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, sehingga mampu menghasilkan kelebihan dana meskipun ada berbagai beban yang harus dikeluarkan. Namun meskipun demikian, surplus tersebut akan di alihkan dalam berbagai kepentingan lembaga, dalam LKS digunakan sebagai pengadaan asset yang dimana berguna untuk keberlangsungan pemberdayaan LKS Ummu Syahidah. Dari laporan tersebut juga terlihat bahwa LKS Ummu Syahidah tidak memiliki pendapatan maupun beban lain-lain yang terjadi karena pembatasan dari pemberi sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa LKS Ummu Syahidah memiliki kebebasan penuh dalam mengelola dana yang diterima dari pemberi sumber daya. Secara keseluruhan, laporan penghasilan komprehensif tersebut dapat memberikan gambaran tentang kinerja keuangan LKS Ummu Syahidah pada bulan Desember 2022.

2) Laporan Perubahan Aset Neto

<b>LKS UMMU SYAHIDAH</b>		
<b>LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO</b>		
<b>DESEMBER 2022</b>		
<b>(Dalam Ribuan Rupiah)</b>		
<b>ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp .</b>	<b>300,000,000</b>
<b>Surplus Tahun Berjalan</b>	<b>Rp .</b>	<b>9,998,000</b>
<b>Aset Neto Yang Dibebaskan Dari Pembatasan</b>	<b>Rp .</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp .</b>	<b>309,998,000.00</b>
<b>Pendapatan Komprehensif Lain</b>		
<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp .</b>	<b>-</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>Rp .</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp .</b>	<b>-</b>
<b>ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI</b>		

<b>SUMBER DAYA</b>		
	<b>Rp</b>	
<b>Saldo Awal</b>	.	-
	<b>Rp</b>	
<b>Surplus Tahun Berjalan</b>	.	-
<b>Aset Neto Yang Dibebaskan Dari</b>	<b>Rp</b>	
<b>Pembatasan</b>	.	-
	<b>Rp</b>	
<b>Saldo Akhir</b>	.	-
	<b>Rp</b>	
<b>TOTAL ASET NETO</b>	.	<b>309,998,000.00</b>

Tabel 2 Laporan Perubahan Aset Neto  
Sumber: Penelitian Skripsi Tahun 2023

Laporan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, pendapatan komprehensif lain, dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Pada bagian aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya, terlihat bahwa saldo awal aset neto pada Desember 2022 sebesar Rp. 300,000,000 dan surplus tahun berjalan sebesar Rp.9,998,000, sehingga saldo akhir aset neto menjadi Rp.309,998,000. Hal tersebut dikarenakan bahwa penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 yang mengharuskan seluruhnya diungkapkan dalam laporan keuangan. Saat saldo akhir menjadi 309,998 bukan berarti terdapat penambahan sejumlah 9.998 pada pendapatan, akan tetapi 9.998 merupakan surplus yang harus diungkapkan diluar dari total semua penghasilan atau pendapatan yang ada di sebuah Lembaga.

Sedangkan, pada bagian pendapatan komprehensif lain seluruh kolom masih kosong (tidak di isi oleh LKS), hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penghasilan komprehensif lain yang dapat diperoleh oleh LKS pada periode tahun berjalan tersebut. Pada bagian aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya (dinas social), seluruh kolom juga masih kosong (tidak di isi oleh LKS) yang menunjukkan bahwa tidak ada aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya (Dinas social ) pada periode tersebut.

### 3) Laporan Posisi Keuangan

<b>LKS UMMU SYAHIDAH</b>
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>
<b>DESEMBER 2022</b>

(Dalam Ribuan Rupiah)			
ASET		LIABILITAS	
ASET LANCAR		Hutang	Rp . -
Kas	Rp 300.000,00		
	. 0		
Piutang	Rp . -		
Perlengkapan	Rp . 4,100,000		
Aset Lancar Lainnya	Rp . -		
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>Rp . 304,100,000</b>	<b>TOTAL HUTANG</b>	<b>Rp . -</b>
ASET TIDAK LANCAR		ASET NETO	
Peralatan	Rp . 7,158,000	Aset Neto Tanpa Pembatasan	Rp 309,998,000.0
Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp . (1,260,000)	Aset Neto dengan Pembatasan	Rp . 0
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>Rp . 5,898,000</b>	<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b>Rp . 309,998,000.0</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>Rp . 309,998,000</b>	<b>TOTAL LIABILITAS + ASET NETO</b>	<b>Rp . 309,998,000.0</b>
	<b>0</b>		<b>0</b>

Tabel 3 Laporan Posisi Keuangan  
Sumber: Penelitian Skripsi Tahun 2023

Berdasarkan laporan posisi keuangan LKS Ummu Syahidah pada Desember 2022, terlihat bahwa perusahaan tidak memiliki hutang atau kewajiban yang harus dibayar pada saat itu. Sementara itu, aset perusahaan terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar perusahaan terdiri dari kas sebesar Rp.300.000.000 juta dan perlengkapan sebesar Rp.4,100.000 juta, sedangkan aset tidak lancar perusahaan terdiri dari peralatan senilai Rp.7.158.000 juta yang sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan

sebesar Rp.1.260.000 juta. Dengan demikian, total aset perusahaan pada Desember 2022 adalah sebesar Rp.309,998 juta, yang seluruhnya merupakan aset neto. Aset neto perusahaan terdiri dari aset neto tanpa pembatasan sebesar Rp.309,998 juta, sedangkan aset neto dengan pembatasan tidak ada.

Secara keseluruhan, laporan posisi keuangan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang cukup baik, karena tidak memiliki hutang dan memiliki aset neto yang signifikan. Namun, informasi yang diberikan dalam laporan ini masih terbatas, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap laporan keuangan yang lebih lengkap untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi keuangan perusahaan.

4) Laporan Arus Kas

<b>LKS UMMU SYAHIDAH</b>			
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>			
<b>DESEMBER 2022</b>			
<b>(Dalam Ribuan Rupiah)</b>			
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan Aktivitas Operasi			
	Rp	300,000,00	
Pendapatan Dana Hibah	.	0	
Total Penerimaan Aktivitas Operasi			Rp. <u>300,000,000</u>
Pengeluaran Aktivitas Operasi			
	Rp	258,000,00	
Beban Gaji	.	0	
	Rp	500,000	
Beban Pemeliharaan	.	500,000	
	Rp	17,552,000	
Beban Lain-Lain	.	17,552,000	
Beban Honorarium Narasumber	Rp	12,600,000	
	Rp	500,000	
Beban Transport	.	500,000	
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp	250,000	
	Rp	600,000	
Beban Perbaikan	.	<u>600,000</u>	

Total Pengeluaran Aktivitas Operasi			(290,002,000)
Penambahan (Pengurangan) Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp.		<u>9,998,000</u>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Total Penerimaan Aktivitas Investasi			-
Pengeluaran Aktivitas Investasi			
Pembelian Peralatan	Rp	7,158,000	
Pembelian Perlengkapan	Rp	<u>4,100,000</u>	
Total Pengeluaran Aktivitas Investasi			(11,258,000)
Penambahan (Pengurangan) Kas Dari Aktivitas Investasi	Rp.		<u>(11,258,000)</u>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Total Penerimaan Aktivitas Pendanaan			-
Penerimaan Aktivitas Pendanaan	Rp.		<u>-</u>
Penambahan (Pengurangan) Kas Dari Aktivitas Pendanaan	Rp.		-
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	Rp.		<u>301,260,000</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	Rp.		<u><b>300,000,000</b></u>

Laporan Arus Kas  
Sumber: Penelitian Skripsi Tahun 2023

Berdasarkan laporan arus kas di atas, dapat dilihat bahwa pada Desember 2022, Ummu Syahidah memperoleh penerimaan aktivitas operasi sebesar Rp.300.000.000 dan mengeluarkan biaya operasi sebesar Rp.290.002.000, yang terdiri dari beban gaji, pemeliharaan, lain-lain, honorarium narasumber, transportasi,

dan penyusutan aset tetap. Sehingga, terdapat penambahan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp.9.998.000. Selain itu, Ummu Syahidah melakukan aktivitas investasi dengan mengeluarkan dana sebesar Rp.11.258.000 untuk pembelian peralatan dan perlengkapan. Sehingga, terdapat pengurangan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp.11.258.000. Tidak ada aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh Ummu Syahidah pada periode tersebut. Sehingga, tidak ada pengaruh pada kas dan setara kas.

Dari laporan arus kas tersebut, dapat disimpulkan bahwa kas dan setara kas awal periode adalah Rp.301.260.000 dan kas dan setara kas akhir periode adalah Rp.300.000.000, sehingga terdapat pengurangan kas sebesar Rp.1.260.000 pada periode tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun terdapat pengurangan kas, Ummu Syahidah masih memiliki posisi kas yang cukup kuat dan mampu untuk membiayai aktivitas operasional dan investasi pada periode berikutnya. Berdasarkan Isak 35, setiap orang atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik diharuskan untuk melaporkan penggunaan dana yang dikelola. Oleh karena itu, jika LKS hanya membuat laporan pertanggungjawaban, maka hal ini tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan Isak 35. Namun, dalam pemaparan hasil wawancara tersebut bahwa LKS harus mengikuti format pelaporan yang telah ditentukan oleh dinas sosial. Jika format pelaporan tersebut mencakup elemen-elemen yang memadai untuk menjelaskan penggunaan dana yang diterima oleh LKS, maka laporan tersebut dapat menjadi alat yang efektif untuk memenuhi persyaratan Isak 35.

Jika laporan pertanggungjawaban LKS tidak memadai atau tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Isak 35, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata kelola keuangan publik yang baik dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. (djkn kemenkeu). Oleh karena itu, LKS harus memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban yang mereka buat memenuhi persyaratan Isak 35 dan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh dinas sosial, hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber daya dan minim pengetahuan mengenai pelaporan yang baik dan benar sesuai standar yang ada. Perbedaan utama antara laporan keuangan RAB dan laporan keuangan menurut ISAK 35 terletak pada lingkup informasi yang disajikan. Laporan RAB hanya memberikan informasi tentang anggaran belanja untuk periode tertentu, sementara laporan keuangan menurut ISAK 35 memberikan informasi yang lebih lengkap tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas LKS.

Selain itu, laporan keuangan menurut ISAK 35 juga memiliki legalitas yang diatur oleh peraturan yang berlaku, sementara RAB tidak diatur oleh peraturan. Dari segi akuntansi, laporan keuangan menurut ISAK 35 juga lebih lengkap karena mencakup berbagai jenis akun, seperti akun-akun penerimaan dan pengeluaran, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas. Sementara dalam RAB, informasi hanya terbatas pada akun-akun pengeluaran. Jika dibandingkan antara laporan keuangan yang dibuat oleh LKS Ummu Syahidah dan laporan keuangan menurut isak 35 adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Laporan RAB LKS Ummu Syahidah	Laporan Berdasarkan ISAK 35 LKS Ummu Syahidah
1.	Informasi yang disajikan	Rencana pengeluaran dan penerimaan kas selama periode tertentu. Gambaran anggaran belanja	Informasi lebih luas mengenai kinerja keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran kas, aset dan kewajiban, serta arus kas Informasi yang lebih lengkap tentang arus kas, aset, kewajiban, ekuitas, serta kinerja keuangan
2.	Waktu pelaporan Periode waktu	Setiap akhir periode anggaran Biasanya hanya untuk periode satu tahun	Setiap akhir periode akuntansi Dapat mencakup beberapa periode, seperti laporan keuangan kuartalan atau tahunan
3.	Ruang Lingkup	Terbatas pada anggaran belanja untuk periode tertentu Cakupan terbatas pada periode anggaran	Cakupan lebih luas, mencakup seluruh periode akuntansi Luas, mencakup informasi tentang arus kas, aset, kewajiban, dan ekuitas
4.	Tujuan serta tujuan pengguna	Menyajikan rencana anggaran belanja untuk periode tertentu Sebagai pedoman dalam mengatur anggaran belanja dan memantau realisasi anggaran belanja.	Menunjukkan kinerja keuangan LKS dan memperlihatkan potensi keuangan LKS untuk pihak-pihak yang tertarik, seperti investor, kreditor, dan pemerintah Menyajikan kinerja keuangan selama periode tertentu, serta kondisi keuangan dan arus kas

		Digunakan oleh pengurus LKS dan pihak yang mengeluarkan dana	Sebagai informasi yang digunakan oleh pemangku kepentingan LKS, seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Digunakan oleh pengurus LKS, pihak yang memberikan dana, investor, dan pihak lain yang membutuhkan informasi tentang kinerja keuangan LKS
5.	Isi Laporan (Keakuratan, Kesalahan, Keandalan)	Hanya mencantumkan rincian anggaran belanja, tidak mencakup informasi tentang aset dan kewajiban LKS. Mengacu pada perkiraan anggaran belanja dan belum mengalami pengeluaran aktual. Dapat terjadi kesalahan dalam membuat proyeksi anggaran belanja. Informasi yang disajikan tidak selalu akurat karena hanya berupa perkiraan	Terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Mengacu pada fakta dan angka aktual yang telah terjadi pada periode waktu tertentu. Dapat terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan. Informasi yang disajikan sangat akurat karena didasarkan pada data aktual dan dicatat secara teratur
6.	Informasi Kunci	Perkiraan pengeluaran dan penerimaan dalam periode anggaran	Aset dan kewajiban, arus kas, laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan
7.	Kebutuhan Penyusunan Pengguna	Harus disusun setiap tahunnya sebelum periode anggaran dimulai. Internal dan eksternal	Harus disusun setiap bulannya atau pada periode tertentu yang ditentukan. Terutama untuk pengguna eksternal, seperti investor, kreditor, dan pihak-pihak yang

			memiliki kepentingan dengan LKS
8.	Auditor Legalitas	Tidak perlu dilakukan audit Tidak diatur oleh peraturan	Dilakukan audit oleh auditor independen Diatur oleh peraturan yang berlaku
9.	Format penyajian	Berupa tabel anggaran belanja	Berupa tabel, grafik, dan catatan atas laporan keuangan
10.	Akun	Terbatas pada akun-akun pengeluaran dalam RAB	Lebih lengkap, meliputi akun-akun penerimaan dan pengeluaran, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas

Tabel 5 Perbandingan laporan RAB dan ISAK 35  
Sumber: Penelitian Skripsi Tahun 2023

N	Fitur Laporan Keuangan	Laporan RAB	Laporan Keuangan (ISAK 35)
1	Informasi tentang anggaran belanja untuk periode tertentu	Ada	Ada
2	Informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas	Tidak ada	Ada
3	Informasi tentang aset dan kewajiban	Tidak ada	Ada
4	Informasi tentang arus kas	Tidak ada	Ada
5	Informasi tentang kinerja keuangan secara keseluruhan	Tidak ada	Ada
6	Memungkinkan evaluasi kinerja keuangan LKS	Tidak secara lengkap	Ya
7	Dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis	Tidak secara lengkap	Ya

8	Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi	Tidak diperlukan	Harus mematuhi Standar Akuntansi yang berlaku
---	--------------------------------------	------------------	-----------------------------------------------

Tabel 6 Perbandingan Fitur Laporan Keuangan

Sumber: Penelitian Skripsi Tahun 2023

Laporan RAB LKS Ummu Syahidah tidak memberikan informasi tentang apakah anggaran yang telah disetujui telah dipenuhi atau melebihi, atau apakah ada perbedaan antara anggaran yang disetujui dan yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, laporan keuangan menyediakan informasi tentang sumber daya finansial dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Informasi ini berguna bagi pihak-pihak yang tertarik untuk menilai kinerja keuangan LKS, seperti donatur, investor, atau lembaga pembiayaan. Selain itu, laporan RAB Ummu Syahidah hanya memberikan informasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan dan biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu, sedangkan laporan keuangan memberikan informasi tentang kinerja keuangan LKS dalam periode tertentu serta arah keuangan LKS untuk masa depan. Dengan demikian, informasi yang diberikan oleh laporan RAB terbatas, sedangkan informasi yang diberikan oleh laporan keuangan lebih komprehensif dan dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depan LKS.

Laporan RAB LKS Ummu Syahidah hanya memberikan informasi tentang rencana anggaran belanja untuk periode tertentu, sedangkan laporan keuangan menurut ISAK 35 memberikan informasi yang lebih lengkap, termasuk posisi keuangan, kinerja, dan arus kas LKS selama periode tertentu, yang meliputi laporan laba rugi. Selain itu, laporan keuangan menurut ISAK 35 disajikan pada akhir periode untuk menyajikan kinerja keuangan selama periode tersebut, sedangkan laporan RAB dilakukan pada awal periode untuk menetapkan rencana anggaran belanja. Tidak Ada Informasi tentang Arus Kas, dalam Laporan RAB tidak memberikan informasi tentang arus kas LKS, yang merupakan informasi penting dalam mengevaluasi kesehatan keuangan dan kemampuan LKS untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Laporan Arus Kas (LAK) memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas LKS selama periode tertentu.

Pada LKS Ummu Syahidah yang hanya membuat laporan RAB menurut ISAK 35, solusinya adalah

dengan memperluas lingkup laporan keuangan dengan menyertakan informasi yang lebih lengkap seperti Laporan Keuangan yang mencakup Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Laporan Keuangan, terdapat informasi tentang kinerja keuangan yang lebih lengkap, termasuk penerimaan dan pengeluaran kas, aset dan kewajiban, serta arus kas, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif tentang kinerja keuangan LKS. Dalam menyusun Laporan Keuangan, LKS Ummu Syahidah dapat menggunakan bantuan tenaga ahli atau konsultan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan membantu LKS Ummu Syahidah dalam mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usahanya ke depan

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh LKS, terdapat beberapa solusi yang dapat diimplementasikan. Pertama, LKS perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Achmad hafisz 2019). Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun laporan keuangan yang lengkap dan transparan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, LKS juga perlu memastikan adanya pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dana. Kedua, LKS perlu meningkatkan kapasitas pengurus dan anggotanya dalam hal pengelolaan keuangan. Pelatihan dan pendidikan terkait pembuatan laporan keuangan, pengendalian anggaran, dan manajemen keuangan perlu diberikan secara teratur. Dengan demikian, pengurus dan anggota LKS akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan lembaga dengan baik.

Selanjutnya, LKS perlu menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga keuangan atau organisasi lain yang dapat memberikan dukungan keuangan atau sumber daya lainnya. Kolaborasi ini dapat membantu LKS dalam mendapatkan sumber dana tambahan, pelatihan, atau bantuan teknis yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Selain itu, LKS perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Penggunaan sistem komputerasi atau perangkat lunak akuntansi dapat mempermudah proses pelaporan keuangan, analisis data, dan pengendalian anggaran.

Terakhir, LKS perlu mengembangkan sumber pendapatan alternatif yang dapat mendukung

keberlanjutan lembaga. Mencari dan mengembangkan program-program pemasaran produk atau jasa yang relevan dengan misi LKS dapat membantu meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengelolaan keuangan. Dalam jangka panjang, LKS perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi solusi-solusi tersebut. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, serta upaya penggalangan dana dan advokasi juga harus terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan lembaga. Dengan komitmen dan kerja sama yang baik, LKS dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mencapai tujuan keberlanjutan serta memberikan dampak positif yang lebih besar kepada masyarakat

#### **D. SIMPULAN**

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana hibah di LKS Ummu Syahidah telah di terapkan dengan cukup baik dapat dilihat dari beberapa syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang sudah berjalan dengan semestinya diantaranya yaitu struktur organisasi, perencanaan/ penganggaran, dan pelaksanaan/ pengendalian. Namun, terdapat beberapa syarat belum bisa dijalankan dengan cukup baik diantara lain yaitu penggolongan biaya/ penyusunan kode rekening dan penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35 yang dimana LKS Ummu Syahidah hanya melakukan penyajian laporan keuangan secara sederhana dan apa adanya yang dimana mereka hanya memuat laporan pertanggungjawaban yang berisi RAB (rancangan anggaran biaya) dan nota nota pembelian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ramadhani F. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pt. Raz Hotel Medan. Published Online 2022.
- Sriyani. Analisis Akuntansi Dan Pelaporan Bantuan Sosial Dan Hibah. *Info Artha*. 2017;4(11):19-38. Doi:10.31092/Jia.V4i4.35
- Hasna DI, Rachman R. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pada Pt. Taspen (Persero) Kc Bogor. *J Ilm Akunt Kesatuan*. 2020;8(1):67-76. Doi:10.37641/Jiakes.V8i1.422
- Zannah I, Ary Satria Putra Fn. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem). *J Ilmu*

*Komputer, Ekon Dan Manaj.* 2022;2(1):4127-4135.

- Erika Sharon Dan Syermi S.E. Mintalangi. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Pt. Perusahaan Listrik Negara (Pln) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. *J Emba J Ris Ekon Manajemen, Bisnis Dan Akunt.* 2021;9(1):1046-1057.
- Safita M. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pt. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. Published Online 2018:12-42. [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/Id/Eprint/12955](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/Id/Eprint/12955)
- Menkeu Ri. Modul Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Hibah. Published Online 2014:48.
- Aminarti M. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggung Jawaban Terhadap Transparansi Laporan Penggunaan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa. *Pesqui Vet Bras.* 2021;26(2). [Http://Www.Ufrgs.Br/Actavet/31-1/Artigo552.Pdf](http://Www.Ufrgs.Br/Actavet/31-1/Artigo552.Pdf)
- Sari A. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat Biaya Pada Pt. Bumi Sarana Beton Makassar. Published Online 2017.
- Septian Dnd. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Menilai Kinerja Manajer Pusat Laba Pada Mestika Mandiri Medan. *Dissertation.* Published Online 2019.
- Rawung Pf. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Penilaian Kinerja Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. Published Online 2022.
- Mariana A. Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Pusat Laba Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pt Aprisindo Kedaton Bandar Lampung). 2020;8(75)
- <https://Doi.Org/10.1016/J.Inc.2020.125798%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Smr.2020.02.002%0ahttp://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pubmed/810049%0ahttp://Doi.Wiley.Com/10.1002/Anie.197505391%0ahttp://Www.Sciencedirect.Com/Science/Article/Pii/B9780857090409500205%0ahttp:>
- Suparyanto Dan Rosad (2015). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Pt. Sumber Sawit Jaya Lestari. 2021;5(3).
- Sulfianty Kartini Muslimin. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial. 2022;5(3):7-12. Doi:10.2568/Yum.V5i3.3067
- Daerah B. Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Published Online 2014:1-15.
- . Azhar, R. (2022). *Tersandung dana hibah mantan ketua koni ditahan polda gorontalo.* <https://regional.kompas.com/read/2022/08/12/105730378/tersandung-dana-hibah-mantan-ketua-koni-ditahan-polda-gorontalo>
- Dewi, N., & Farina, D. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan ISAK Nomor 35 (Studi pada Masjid Nurul Iman Tabek Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSya)*, 2(1), 33–48.

<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jaksya/article/view/5042%0Ahttps://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jaksya/article/download/5042/2406>

- Mawarni, Z., & Retnani, E. D. (2016). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/10.56146/khidmatussifa.v1i2.63>
- Mengko, S. M. P., & Tirayoh, V. Z. (2015). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran sebagai Alat Pengendalian Biaya pada PT Gotrans Logistic Cabang Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).
- Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daer.* (2021).
- Tambunan, R. (2020). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pengukur Kinerja Manajer pada CV. Usaha Semesta. *Jurnal Maksitek*, 5(2).
- Utami, I. A. T. (2019). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya. *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi (JAMDI)*, 2(2).
- Zaitun. (2019). *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pengendalian Biaya pada Bank Pekreditan Rakyat (BPR) Rokan Hilir.* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.